

	News Title : Sederet Capaian Bappebti hingga Oktober 2023	
	Media Name : Liputan6.com	Journalist : Elga Nurmutia
	Publish Date : 01 November 2023	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 2,250,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Kinerja Bappebti

Home > Bisnis > **Ekonomi**

Sederet Capaian Bappebti hingga Oktober 2023



Elga Nurmutia
Diperbarui 01 Nov 2023, 19:22 WIB



Share
17



Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menyampaikan perkembangan capaian kinerja Bappebti.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menyampaikan perkembangan capaian kinerja Bappebti di sela persiapan alih tugas Kepala **Bappebti**.

Menurut ia, Bappebti terus berupaya memperkuat perdagangan dan ekonomi digital di Indonesia melalui pengembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

BACA JUGA: [Investor Kripto di Indonesia Sentuh 17,91 Juta hingga September 2023](#)

"Berbagai kebijakan strategis dibuat untuk memberikan ruang bagi pengembangan usaha dan inovasi dalam ketiga **industri** tersebut, serta memberikan kepastian berusaha dan perlindungan hukum bagi masyarakat," kata Didid dalam keterangan resminya, ditulis Rabu (1/11/2023).

Di bidang aset kripto, hingga Oktober 2023, Bappebti telah mengeluarkan izin berupa tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto kepada 32 perusahaan untuk dapat melakukan transaksi perdagangan di pasar fisik aset kripto.

"Perdagangan aset kripto dapat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat, menciptakan, dan mendorong upaya pengembangan ekonomi digital Indonesia pada 2030," ujar Didid.

Seiring dengan pengesahan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK), kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor inovasi teknologi, keuangan digital dan aset **kripto** menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, pengawasan atas aset kripto akan beralih dari Bappebti ke OJK.

Pada 17 Juli 2023, Bappebti juga telah menerbitkan persetujuan Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara, Lembaga Kliring Berjangka Aset Kripto kepada PT Kliring Berjangka Indonesia; serta Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tennen Depository Indonesia.

Dia mengatakan, dengan adanya kelembagaan perdagangan aset kripto memberikan dampak positif terhadap kenaikan jumlah pelanggan aset kripto. Hal ini menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat dalam memilih aset kripto sebagai alternatif investasi. Jumlah pelanggan aset kripto hingga September 2023 mencapai 17,91 juta pelanggan dengan **nilai transaksi** sebesar Rp94,41 triliun.

Didid menegaskan, Bappebti terus berkomitmen memperkuat pengembangan perdagangan aset kripto di Indonesia melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan, asosiasi, dan instansi terkait. "Penguatan literasi kepada masyarakat juga dilakukan dengan menggandeng media massa agar masyarakat memperoleh informasi yang benar tentang aset kripto," imbuhnya.

Nilai Transaksi PLK Capai Rp43,85 Miliar dan Instrumen PLK akan Diperkuat

Kepala Bappebti mengajak pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ekosistem PLK. Langkah ini dilakukan untuk memfasilitasi terwujudnya PLK sebagai salah satu instrumen perdagangan berjangka komoditas yang akan mengangkat unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PLK merupakan pasar fisik komoditas yang terorganisasi bagi pelaku usaha untuk bertransaksi melalui sistem lelang.

PLK akan mewujudkan perdagangan yang transparan, adil, akuntabel, dan stabilisasi harga. Selain itu, PLK juga dapat menjadi akses pasar untuk komoditas yang disimpan di gudang SRG.

"Salah satu indikator yang memengaruhi pengembangan dan pemanfaatan PLK adalah penguatan tataran regulasi. Ke depan, instrumen PLK sangat dibutuhkan untuk mendapatkan harga yang adil dan transparan bagi petani, nelayan, peternak dan masyarakat kecil serta menumbuhkan industri di dalam negeri. Untuk itu, perlu dipastikan mekanisme perdagangan berjalan kompetitif serta memberikan perlindungan masyarakat," jelas Didid.

Adanya Peraturan Presiden No 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan PLK merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam melakukan penguatan kebijakan dan menjadi dasar pengembangan PLK.

"Kementerian Perdagangan diamanahkan untuk menyusun peraturan turunan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan PLK melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Permendag akan mengatur Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) dan substansi teknis implementasi PLK, sebagaimana tertuang dalam Perpres tersebut, dan saat ini sudah berproses," ujar Didid.

Rancangan Permendag PLK akan mengatur beberapa hal. Pertama, pasar lelang spot dan forward yang melibatkan banyak penjual dan pembeli sebagai peserta lelang. Kedua, penyelenggara lelang komoditas harus mendapatkan izin dari Bappebti. Ketiga, Bappebti mengawasi pelaksanaan lelang komoditas di Indonesia.

Keempat, komoditas yang ditransaksikan melalui PLK harus memiliki standar mutu. Kelima, dalam mekanismenya, PLK akan diintegrasikan dengan SRG sebagai akses pasar komoditas yang disimpan di gudang SRG.

Keenam, komoditas yang ditransaksikan melalui PLK akan diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan berdasarkan masukan dari K/L, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Menurut Didid, nilai transaksi PLK pada Januari--Oktober 2023 mencapai Rp58,6 miliar. Transaksi PLK ini mencakup komoditas karet, kopi, beras, dan komoditi pertanian lainnya.

BACA JUGA:

[Bursa CPO Mulai Diperdagangkan 23 Oktober 2023](#)

8 dari 8 halaman

Penilaian Berkala Pialang Berjangka Komoditi

Bappebti menerapkan sistem penilaian berkala (rating) pialang berjangka komoditi setiap tiga bulan. Pada 15 Juli 2023 lalu, Bappebti telah mempublikasikan hasil penilaian berkala pialang berjangka komoditi pada periode Januari--April 2023 pada situs web Bappebti. Hal ini berkaitan dengan masih banyaknya permasalahan dan pengaduan terkait SPA.

Penilaian berkala pialang berjangka dilakukan berdasarkan pada tiga indikator/parameter, yaitu kinerja pialang berjangka, penilaian masyarakat, dan nilai pengurang. Data dalam penyusunan penilaian berkala bersumber dari pelaporan pialang berjangka ke Bappebti, meliputi laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan transaksi, dan penilaian implementasi Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Upaya penanganan pengaduan dan penilaian nasabah juga menjadi pertimbangan dalam penilaian berkala pialang berjangka.

Dia bilang, penilaian berkala tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas, kinerja, dan motivasi para pialang berjangka komoditi dalam melakukan usaha di bidang PBK sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Penilaian berkala juga bertujuan agar masyarakat semakin percaya dan terlindungi dalam bertransaksi di bidang PBK melalui pialang berjangka dengan rating yang baik," tandasnya.